

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG



**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian
2007**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MODEL PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

Penyusun : Kusuma Diwyanto
Ismeth Inounu
Argono R. Setioko
Subandriyo
I Putu Kompiang
Lies Parede
Atien Priyanti
Eny Martindah
Ratna Ayu Saptati
Imas Sri Nurhayati

Diterbitkan oleh : Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan
Jl. Raya Pajajaran Kav.E-59
Bogor, 16151
Telp. (0251) 322185 ; 322138
Fax (0251) 328382 ; 380588
Email: criansci@indo.net.id

ISBN 978-979-8308-79-6

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Bogor, 2007**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MODEL PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

Hak Cipta ©2007. Pusat Penelitian dan Pengembangan
Peternakan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jl. Raya Pajajaran Kav.E-59
Bogor, 16151
Telp. : (0251) 322185 ; 322138
Fax : (0251) 328382 ; 380588
Email : criansci@indo.net.id

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Pengembangan
Usaha Sapi Potong / Kusuma Diwyanto dkk. – Bogor:
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2007:
xiv + 44 hlm; illus.; 16 cm.

ISBN 978-979-8308-79-6

1. Sapi Potong 2. Pemberdayaan Masyarakat 3. Model
Pengembangan
I. Judul; II. Pusat Penelitian dan Pengembangan
Peternakan;
III. Diwyanto, K. 636.28

KATA PENGANTAR

Kebijakan menuju swasembada daging sapi pada tahun 2010 secara resmi telah dinyatakan Pemerintah (cq. Departemen Pertanian) sebagai langkah konkrit tindak lanjut Revitalisasi Pertanian yang telah dicanangkan Presiden pada tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur, Jawa Barat. Dalam konteks ketahanan pangan, langkah untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan hewani ini perlu segera direalisasikan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa ketergantungan pada impor produk peternakan akan menguras devisa dan melemahkan kemandirian bangsa.

Kurangnya pasokan sapi bakalan merupakan permasalahan utama dalam industri sapi potong di Indonesia, sehingga perlu upaya terhadap intensifikasi program *breeding, cow calf operation* dan penggemukan. Oleh karena itu perlu dicari alternatif model pengembangan usaha sapi potong melalui pola kemitraan dengan sasaran ganda yaitu meningkatkan produksi dan memberdayakan petani dan peternak. Bila saat ini usaha penggemukan lebih bertumpu pada pasokan *sapi bakaln* impor, ke depan perlu diupayakan untuk mencari penggantinya yang berasal dari sapi lokal. Namun, keberhasilan suatu program harus didasarkan pada kekuatan dan potensi sumberdaya lokal seperti pakan dan bibit. Program ini perlu didukung oleh masyarakat sejak awal dengan mempertimbangkan aspek kearifan lokal yang dikombinasikan dengan aplikasi teknologi inovatif ramah lingkungan. Pendekatan aspek sosial melalui pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan karena peningkatan produksi sapi nasional harus searah dengan perbaikan taraf hidup masyarakat untuk dapat hidup lebih sejahtera.

Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Analisis Kebijakan Puslitbang Peternakan telah menyusun konsep awal tentang

pemberdayaan masyarakat melalui model pengembangan usaha sapi potong. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan diskusi panel bekerjasama dengan Ditjen Peternakan dan Asosiasi di bidang peternakan (APFINDO dan PPSKI). Diskusi ini diikuti oleh hampir seluruh pengemban kepentingan yang terdiri dari pelaku usaha, pengambil kebijakan dan pimpinan UPT bidang perbibitan, serta para peneliti dan akademisi. Pembicara utama dalam diskusi ini adalah para pelaku usaha yang telah sukses mengembangkan bisnis sapi potong, yang diharapkan dapat menawarkan alternatif model pembangunan sapi potong.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya dokumen ini. Buku ini merupakan dokumen dinamis yang dirasakan masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan saran yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat berguna bagi para pembaca untuk implementasi program usaha sapi potong lebih lanjut di masa-masa yang akan datang

Bogor, Nopember 2007
Kepala Puslitbang
Peternakan

Dr. Abdullah Bamualim

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Pendahuluan	1
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Pengembangan Usaha Sapi Potong	6
Sasaran	6
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Pembesaran Sapi Bali.....	8
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan Penggemukan Sapi Hasil IB	13
Pengembangan Industri Pakan Skala Kecil Berbasis Sumberdaya Lokal	15
Pengembangan Usaha Sapi Dengan Prinsip Ramah Lingkungan	17
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	19
Matriks Rencana Tindak Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Pengembangan Usaha Sapi Potong	22
Daftar Bacaan	30
Tim Perumus	31

Lampiran	33
1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui <i>Contract Farming</i> Sapi Bali	34
2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Pengembangan dan Pemanfaatan Sapi Hasil IB.....	38
3. Pemanfaatan Limbah Pertanian Agroindustri Dalam Agribisnis Sapi Bali	41
4. Pengembangan Peternakan Sapi Perah Dengan Pendekatan <i>Zero Waste</i> dan <i>Zero Cost</i>	43

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENDAHULUAN

1. Kebijakan menuju swasembada daging sapi pada tahun 2010 yang telah secara resmi dinyatakan oleh Pemerintah (cq. Departemen Pertanian) sebagai langkah konkrit tindak lanjut Revitalisasi Pertanian perlu untuk terus didorong. Kurangnya pasokan sapi bakalan merupakan permasalahan utama dalam industri sapi potong di Indonesia, sehingga perlu upaya terhadap intensifikasi program *breeding, cow calf operation* dan *fattening*. Model pengembangan usaha sapi potong melalui pola kemitraan dengan kelompok peternak atau koperasi dapat menjadi salah satu alternatif model pengembangan untuk menghasilkan sapi bakalan. Masih terdapat peluang untuk mendorong dan mengembangkan usaha penggemukan sapi lokal sebagai alternatif dan substitusi secara gradual usaha penggemukan sapi eks impor. Namun, keberhasilan suatu program harus didasarkan pada kekuatan dan potensi sumberdaya lokal seperti pakan dan bibit. Program ini perlu didukung oleh masyarakat sejak awal dengan mempertimbangkan aspek kearifan lokal. Pendekatan aspek sosial melalui pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan karena peningkatan produksi sapi nasional harus searah dengan perbaikan taraf hidup masyarakat untuk dapat hidup lebih sejahtera.
2. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan kebijakan dan program yang komprehensif dan sinergis dari segenap pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menghimpun masukan, serta menggali pengalaman dan belajar dari keberhasilan masyarakat dalam mengembangkan usaha agribisnis sapi potong, Puslitbang

Peternakan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Asosiasi Bidang Peternakan sapi (PPSKI dan APFINDO) telah mengadakan suatu diskusi panel pada tanggal 14 Nopember 2007 di Jakarta. Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan diskusi ini adalah suatu saran rekomendasi untuk implementasi atau alternatif program pemberdayaan masyarakat melalui usaha pengembangan sapi potong dan dapat dipergunakan oleh Ditjen Peternakan dalam rangka mempertajam menuju program swasembada daging sapi tahun 2010.

MODEL PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

3. Intensifikasi program *breeding* atau pengembangan pembibitan sapi dengan memanfaatkan potensi ternak lokal maupun silangan sangat diperlukan untuk menjamin kemandirian dalam penyediaan pejantan unggul. Pemerintah (Ditjen Peternakan dengan jajaran UPT atau UPTD Perbibitan) dapat mengakselerasi program ini dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan pejantan unggul sapi lokal atau sapi *exotic* (Simmental, Limousin, Brahman, dll) untuk mendukung program InKA dan IB. Unit kerja atau unit pelaksana teknis yang terkait dengan pembibitan, seperti BPTU, BET, B/BIB maupun UPTD Perbibitan dan lembaga penelitian harus bekerjasama guna mencapai sasaran tersebut dengan efisien. Manajemen untuk kegiatan ini harus mengacu pada *Good Breeding Practices* melalui pendekatan *zero waste* dan *zero cost* sehingga dihasilkan ternak bibit sebagai bahan dasar pengembangan usaha *cow calf operation*. Usaha *cow calf operation* dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha dengan dukungan *soft loan* jangka panjang.

4. Program pengembangan usaha *cow calf operation* perlu dilakukan dalam upaya menghasilkan sapi bakalan (*feeder cattle*) dan pasokan sapi betina berkualitas untuk *replacement* atau disebarakan ke masyarakat. Program ini dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembesaran dan penggemukan, agar terjadi subsidi silang. Pemanfaatan sumberdaya pakan lokal secara optimal dan inovasi kelembagaan yang tepat serta adanya dukungan permodalan dan pemasaran yang baik menjadi dasar keberhasilan pelaksanaan program. Program ini juga mempunyai manfaat untuk dapat mengurangi dan mengendalikan pengeluaran sapi muda atau sapi kecil, sehingga laju pengurusan ternak dapat dihambat.

5. Program pengembangan usaha pembesaran sapi lokal dapat dilakukan dengan melibatkan petani miskin sebagai mitra usaha dengan implementasi program yang sederhana dan mudah dipahami. Hasil dari program pembesaran sapi Bali di NTT misalnya, adalah sapi dengan bobot 250 kg yang secara teknis maupun ekonomis masih layak untuk dijadikan sapi bakalan yang dapat digemukkan mencapai bobot diatas 300 kg. Pengembangan program pembesaran sapi dapat dilakukan bila ada jaminan pasokan sapi-sapi lepas sapih dengan ukuran tinggi badan tertentu. Hal ini dapat diwujudkan apabila pengeluaran ternak bibit dibatasi, dan pelarangan pemotongan betina produktif benar-benar dilaksanakan, dengan *law enforcement* yang konsisten. Pengendalian dan pemberantasan penyakit menular harus terus dilakukan, antara lain cakupan dan intensitas vaksinansi yang lebih luas dan teratur. Keberhasilan PUSKUD Nusa Tenggara Timur dalam membina petani dalam usaha ini dapat dipergunakan sebagai salah satu alternatif model untuk menghasilkan sapi potong maupun bakalan.

6. Program pengembangan usaha penggemukan sapi lokal maupun sapi silangan hasil IB sepenuhnya sudah dapat dilakukan masyarakat dengan dukungan kredit. Swasta dan/atau BUMN/BUMD dapat berperan aktif dalam usaha ini untuk menyediakan sapi-sapi siap potong dengan bobot optimal sesuai potensi genetik melalui inovasi teknologi pakan murah. Kegiatan penggemukan hanya dapat dilakukan bila tersedia konsentrat dengan kualitas dan harga yang sesuai. Pelaksanaan kegiatan di KJUB Puspetasari, Klaten yang menerapkan *good governance* ini dapat dipergunakan sebagai model untuk direplikasikan di daerah lain.

DUKUNGAN TEKNOLOGI UNTUK PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

7. Dukungan inovasi teknologi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian (Loka Penelitian Sapi Potong Grati, Balitnak, dlsb) maupun perguruan tinggi sangat diperlukan dalam rangka implementasi program pengembangan usaha sapi potong. Inovasi teknologi penjarangan dan pemanfaatan sapi hasil pembesaran sebagai calon pejantan untuk mendukung program intensifikasi kawin alam (InKA) dan IB dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu genetik melalui *outcrossing* dan menghindari terjadinya *inbreeding*.
8. Inovasi teknologi pakan murah berbasis sumberdaya lokal dan limbah pertanian, perkebunan dan agro industri perlu dilakukan dalam rangka menyediakan sumber bahan baku pakan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi bahan dasar dalam penyusunan pakan komplit yang murah dan berkualitas sehingga terjangkau oleh masyarakat. Penanaman hijauan pakan ternak yang tahan terhadap penyakit dan kekeringan, seperti lamtoro dan tanaman leguminosa lain di lahan 'kosong' perlu digalakkan disertai

dengan upaya pengembangan *feed bank* untuk varietas tanaman pakan ternak yang lebih produktif.

- 9: Inovasi sistem integrasi tanaman-ternak melalui pendekatan *zero waste* perlu dilakukan untuk dapat mencapai usaha peternakan yang *zero cost*. Usaha *cow calf operation* hanya dapat terus berkembang apabila biaya pakan dapat ditekan serendah mungkin, atau eksternal input diminimalkan. Hal ini juga perlu dibarengi dengan pengolahan dan pemanfaatan kotoran ternak (*urine* dan *manure*) untuk kompos atau biogas untuk kebutuhan rumahtangga, seperti yang telah diaplikasi PT Lembah Hijau Multifarm di Solo.

PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

10. Perlu adanya upaya akselerasi pembentukan program agribisnis pola kemitraan yang sederhana dan mudah dipahami dengan prinsip adil, jujur, transparan dan konsisten. Kesepakatan kerjasama yang transparan dengan pembagian keuntungan 70 persen bagi peternak dan 30 persen untuk inti seperti yang dilakukan PUSKUD NTT ternyata jauh lebih baik dibandingkan dengan pola gaduhan atau program berbantuan lain.
11. Pembentukan kelompok peternak dan gabungan kelompok peternak berdasarkan prinsip-prinsip berkooperasi yang baik, serta dilakukan dengan cara sukarela perlu terus dilaksanakan. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan peran kelompok peternak dalam posisi tawar, akses informasi dan efektivitas komunikasi yang pada umumnya masih sangat rendah.

12. Pembentukan tenaga pendamping dan pengawalan swakarsa dengan semangat dan etos kerja tinggi, serta memperhatikan sosial budaya masyarakat dan aspek kearifan lokal penting untuk dilakukan. Demikian pula dengan upaya revitalisasi tenaga penyuluh dan sarjana pertanian dalam membangun desa. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendampingan, pengawasan dan akurasi program oleh tenaga yang terampil dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Tersedianya tenaga-tenaga lapang yang terampil dan berdedikasi dapat menjamin program yang diimplementasikan berjalan sesuai harapan.

DUKUNGAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

13. Perlu adanya pengaturan dan penetapan tarif ekspor untuk bahan baku pakan ternak yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan industri pakan dalam negeri. Saat ini banyak bahan pakan yang diekspor, seperti pucuk tebu, onggok, gaplek, bungkil inti sawit, dlsb. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan PP, KepMen, dan/atau Perda tentang pengaturan ekspor, impor dan tataniaga bahan pakan, dengan sasaran ketersediaan bahan-bahan tersebut diutamakan untuk keperluan industri pakan dan usaha peternakan di dalam negeri dengan semangat debirokratisasi.
14. Penegakan aturan tentang larangan pemotongan ternak betina produktif, pengendalian pengeluaran bibit, serta aturan pemotongan ternak muda, dilakukan antara lain dengan sistem *reward and punishment* atau 'insentif dan disinsentif'. Peraturan daerah tentang pelaksanaan larangan pemotongan betina produktif dan sistem pajak progresif dalam pemotongan ternak muda (kecil) dan produktif dapat menjadi bahan kajian dalam pengaturan tersebut.

15. Dukungan kebijakan investasi usaha pengembangan sapi potong melalui *softloan* jangka panjang melalui subsidi bunga kredit komersial (6 persen) sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mendorong swasta/BUMN atau koperasi agar dapat tertarik untuk mengembangkan usaha *cow calf operation* yang terintegrasi dengan usaha pembesaran dan penggemukan. Upaya ini harus juga disertai dengan pemberian fasilitas kemudahan akses petani pada lembaga keuangan mikro melalui berbagai skim pembiayaan pertanian.

PENUTUP

Pembesaran sapi muda secara baik untuk dijadikan sapi bakalan (*feeder cattle*) yang akan digemukkan untuk mencapai bobot potong ideal dapat meningkatkan produksi daging secara cukup signifikan. Seandainya saat ini rata-rata bobot potong sapi lokal kurang dari 250 kg, dengan proses penggemukan pada periode tertentu sampai diatas 300 kg akan diperoleh tambahan daging sedikitnya sebesar 50 kg per ekor. Bila hal ini dapat diwujudkan, secara nasional akan diperoleh peningkatan produksi daging sekitar 30-50 persen. Usaha *cow calf operation* untuk menghasilkan sapi bakalan dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembesaran dan penggemukan, sehingga akan terjadi subsidi silang. Untuk menekan biaya produksi, pola integrasi dengan pendekatan *zero waste* akan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Dengan kebijakan dan program yang tepat, dan dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan teknologi yang berbasis sumberdaya lokal, program untuk meningkatkan produksi daging sapi secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

PENDAHULUAN

Kebijakan menuju swasembada daging sapi pada tahun 2010 yang telah secara resmi dinyatakan oleh Pemerintah (c.q. Departemen Pertanian) sebagai langkah konkrit tindak lanjut Revitalisasi Pertanian perlu untuk terus didorong. Dalam konteks ketahanan pangan, langkah untuk swasembada ini sangat penting diwujudkan karena ketergantungan kepada pihak lain dipastikan akan mempunyai tingkat resiko dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara.

Kondisi faktual peternakan sapi potong yang ada saat ini didominasi oleh peternakan rakyat dengan tingkat kepemilikan rata-rata 2 – 4 ekor. Ditjennak (2006) menyatakan bahwa terdapat sekitar 4 juta rumahtangga peternak sapi potong yang memelihara sekitar 10,5 juta ekor sapi. Ditinjau dari sebaran populasi, sekitar 45 persen berada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Suatu kenyataan menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional, diperlukan impor 380 ribu ekor sapi bakalan dan 50 ribu ton daging dan jerohan (Boediyono, 2007). Padahal, konsumsi daging sapi nasional per kapita masyarakat Indonesia masih sangat kecil, sekitar 1,72 kg per tahun, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan negara ASEAN. Hal ini diproyeksikan akan terus meningkat sebesar 2-3 kali lipat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik (Kasryno *et al.*, 2004). Perubahan pola konsumsi ini juga didorong oleh arus urbanisasi, serta kesadaran gizi dan perubahan gaya hidup masyarakat.

Permasalahan nasional pada industri sapi potong adalah kurangnya pasokan sapi bakalan, sehingga perlu upaya terhadap intensifikasi program *breeding*. Di sisi lain kegiatan usaha

breeding sapi potong bukan merupakan kegiatan usaha yang *feasible* dan kurang mendapat dukungan dari pihak perbankan. Selain *turnover* yang sangat kecil juga dibutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga tidak menarik bagi investor. Bahkan BUMN yang menangani *breeding* sapi sudah bangkrut sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Satu-satunya usaha *breeding* dengan sistem pastoral yang ada di Sulawesi juga tidak berkembang dengan baik meskipun terdapat angka permintaan yang tinggi akan sapi bakalan. Oleh karena itu kemungkinan untuk menarik investor ataupun dana masyarakat memasuki usaha *breeding* sapi potong sangat kecil.

Demikian pula halnya dengan sumberdaya peternak yang relatif terbatas, utamanya modal, menjadikan salah satu penyebab belum optimalnya produksi sapi potong nasional akibat terbatasnya skala usaha. Upaya mendorong peningkatan produksi sapi tidak dapat hanya dilakukan dengan pendekatan teknis berupa introduksi inovasi teknologi semata. Pendekatan aspek sosial melalui program pemberdayaan masyarakat, khususnya peternak, harus dilakukan. Hal ini perlu diperhatikan karena peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi potong nasional harus searah dengan upaya perbaikan taraf hidup peternak untuk dapat hidup lebih sejahtera.

Selain itu sasaran untuk meningkatkan produksi sapi dalam negeri juga dapat ditempuh melalui pemanfaatan potensi genetik sapi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok peternak untuk pengembangan usaha sapi potong. Dengan upaya ini diharapkan produksi daging akan meningkat sehingga volume impor daging dan sapi bakalan hanya sebesar 9,8 persen (Ditjennak, 2007). Diharapkan juga akan muncul alternatif model-model pengembangan usaha sapi potong berbasis sumberdaya lokal dan terciptanya kelompok-kelompok peternak usaha sapi potong

yang tangguh.

Suatu studi kasus dan pengamatan di lapang dalam satu tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan masyarakat dalam merevitalisasi kegiatan agribisnis peternakan sapi potong berbasis sumberdaya lokal, antara lain: (a) PUSKUD NTT telah berhasil menghimpun petani untuk melakukan kontrak farming sapi Bali di daerah Kupang dan sekitarnya, (b) Program revitalisasi peternakan dengan memanfaatkan sapi lokal hasil IB yang dilaksanakan di Klaten dan sekitarnya, (c) Bisnis pakan dari suatu pabrik pakan mini di Grati, Pasuruan dengan memanfaatkan berbagai limbah perkebunan dan agro industri yang saat ini masih terbuang dengan suatu inovasi sederhana, sehingga harga pakan yang dijual relatif murah, dan (d) Usaha *cow calf operation* dengan pendekatan *zero waste* dan *zero cost* di PT. Lembah Hijau Multifarm, Solo.

Dari keempat contoh tersebut diatas terdapat beberapa persamaan yang membuat kegiatan revitalisasi peternakan menjadi sukses. Hal ini meliputi: (a) Program atau bisnis disusun dengan cara yang sederhana, sehingga mudah dipahami masyarakat, (b) Program disosialisasikan dengan baik dengan melibatkan masyarakat sejak awal, (c) Program dilaksanakan secara terbuka, konsisten, akurat dan penuh kejujuran, serta (d) Kegiatan dilakukan dengan memenuhi kriteria bisnis yang adil.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menghimpun masukan, serta menggali pengalaman dan belajar dari keberhasilan masyarakat dalam mengembangkan usaha agribisnis sapi potong, Puslitbang Peternakan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Asosiasi Bidang Peternakan (PPSKI dan APFINDO) telah mengadakan suatu diskusi panel pada tanggal 14 Nopember 2007 di Jakarta.

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan diskusi ini adalah suatu saran rekomendasi untuk implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui usaha pengembangan sapi potong dan dapat dipergunakan oleh Ditjen Peternakan dalam rangka mempertajam menuju program swasembada daging sapi tahun 2010.

Diskusi panel ini dihadiri oleh sekitar 75 orang peserta terdiri dari penentu kebijakan di tingkat pusat seperti Direktur Jenderal Peternakan, Direktur Perbibitan dan Direktur Budidaya Ternak Ruminansia, Kepala Puslitbang Peternakan, Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat, para peneliti dan pengkaji lingkup Badan Litbang Pertanian, akademisi (Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Bandung), UPT Direktorat Jenderal Peternakan (para kepala BPTU, Kepala BPT-HMT Baturaden, Purwokerto dan Kepala BBIB Singosari Malang), swasta/praktisi (PT Santori dan PT Lembu Jantan Perkasa) serta asosiasi/organisasi profesi (ISPI Pusat, PPSKI, APFINDO). Pembahas utama dalam diskusi ini adalah Direktur Budidaya Ruminansia, Ditjen Peternakan dan Sekjen PPSKI. Narasumber yang dihadirkan beserta topik bahasan adalah sebagai berikut:

1. **Beny Subagiyo, S.E. (Pusat KUD, Nusa Tenggara Timur):** "Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Contract Farming* Sapi Bali: *success story*, kendala dan harapan".
2. **Bambang Wibisono (Koperasi Jasa Usaha Bersama Puspetasari, Klaten):** "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Pengembangan dan Pemanfaatan Sapi Hasil IB: *success story*, kendala dan harapan".
3. **Ir. Didiek E. Wahyono dan K. Anam (PT. Prima Feed, Grati, Pasuruan):** "Pemanfaatan Limbah Pertanian Agroindustri dalam Agribisnis Sapi Bali"

4. **Ir. Suharto, MS (PT. Lembah Hijau Multifarm, Solo):**
"Pengembangan Peternakan Sapi dengan Pendekatan *Zero Waste* dan *Zero Cost*".

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MODEL PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

SASARAN

1. Mengupayakan penajaman program guna mendorong pencapaian swasembada daging sapi tahun 2010 melalui program pemberdayaan masyarakat. Program aksi untuk replikasi pengembangan usaha sapi potong di wilayah atau daerah lain dapat dikembangkan berdasarkan kesesuaian agroekosistem dan kondisi sosial budaya masyarakat. Prinsip-prinsip agribisnis harus dijalankan secara konsisten disertai dengan implementasi penegakan hukum, *good governance* serta penerapan *reward and punishment*.
2. Keberhasilan suatu program dalam upaya meningkatkan produksi sapi potong di dalam negeri harus didasarkan pada kekuatan dan potensi sumberdaya lokal, utamanya pakan dan bibit ternak. Bahan baku pakan lokal yang berasal dari hasil samping usaha agribisnis atau agroindustri banyak yang belum dimanfaatkan dan terbuang, dipergunakan untuk keperluan nonpertanian, bahkan sebagian justru diekspor. Sapi Bali memiliki keunggulan tingkat reproduksi yang tinggi dan tahan terhadap penyakit serta kondisi pakan yang kurang berkualitas.

3. Mengupayakan pembentukan kelompok-kelompok peternak dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha sapi potong. Pembinaan terhadap para peternak dengan pengawasan yang konsisten dari tenaga lapang serta mengikutsertakan tokoh masyarakat atau pamong desa dalam pelaksanaan sistem menuntut suatu komunikasi efektif, terkoordinasi dan transparan dengan tetap mempertimbangkan aspek kearifan lokal yang ada.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI USAHA PEMBESARAN SAPI BALI DI NUSA TENGGARA TIMUR

Pusat KUD (PUSKUD) NTT telah mampu menciptakan lapangan kerja bagi petani miskin dengan memelihara sapi secara 'gaduhan'. Program kemitraan pembesaran sapi Bali dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya (pakan) lokal terutama lamtoro dan hijauan lainnya yang tersedia di perdesaan. Program yang dimulai sejak tahun 2002 ini telah mampu memberikan manfaat (*benefit*) sangat besar bagi petani di NTT yang tidak mempunyai alternatif pekerjaan lain, serta tidak memiliki cukup sumberdaya (terutama modal), ketrampilan, dan akses pemasaran.

Keberhasilan kegiatan tersebut didukung oleh suatu program yang sangat sederhana dan mudah dipahami, serta dilaksanakan dengan pendekatan dan prinsip agribisnis yang dilakukan secara jujur, adil, transparan, dan konsisten. Petani berhak memperoleh pendapatan sebesar 70 persen dari keuntungan (selisih harga jual sapi dengan harga pembelian sapi), sedangkan PUSKUD mendapatkan 30 persen. Proporsi yang diterima petani ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak farming serupa dalam program lainnya. Untuk menjamin keberhasilan program, PUSKUD melakukan pembinaan dan pengawalan secara penuh oleh 15 'penyuluh' atau sebagai tenaga pendamping swakarsa dengan rata-rata berpendidikan lulus SLTA yang telah terdidik dan terampil, serta bekerja dengan penuh dedikasi. Akurasi dan konsistensi dalam melaksanakan program merupakan salah satu kunci keberhasilan kegiatan ini, yang antara lain dengan mewujudkan *good governance* melalui

penegakan aturan (*law enforcement*) dan pemberian penghargaan (*reward and punishment*) secara adil.

Survei lapang melalui pendekatan *participatory rural appraisal* (PRA) dan sosialisasi program, serta dukungan tokoh masyarakat dan perangkat desa merupakan langkah awal dalam menetapkan lokasi kegiatan. Peserta program ini harus membentuk suatu kelompok peternak, dan pemilihan pengurus kelompok yang dilakukan secara demokratis. Prinsip-prinsip berkooperasi merupakan landasan pembentukan kelompok. Penetapan peserta program dan jumlah ternak yang dapat diberikan didasarkan atas kelayakan atau kemampuan teknis (ketersediaan hijauan pakan ternak, jumlah tenaga kerja keluarga yang bersedia bekerja keras, dan kesiapan untuk menyediakan kandang sederhana), serta bersedia memenuhi kesepakatan kerjasama yang telah ditetapkan.

Transparansi dan kejujuran dimulai sejak pengadaan sapi bakalan yang dilakukan bersama-sama antara petani, pengurus/perwakilan kelompok, pengurus/staf koperasi dan aparat desa. Penetapan harga beli ternak yang memenuhi standar ditetapkan secara transparan, dan berdasarkan harga penawaran yang paling murah. Petani secara penuh berhak menentukan persetujuan atau penolakan atas sapi yang akan dipelihara. Kerjasama ini dituangkan dalam suatu surat perjanjian yang dirinci secara jelas dan tegas semua hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta resiko atau sanksi bila terjadi pelanggaran. Perjanjian ini ditanda tangani oleh petani dan koperasi, disaksikan oleh pengurus kelompok dan pamong desa. Mengingat sebagian besar petani adalah putra daerah berpendidikan relatif rendah, maka sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dilakukan penjelasan secara rinci dan gamblang.

Secara reguler petugas lapang melakukan monitoring tentang perkembangan yang terjadi di lapang, sehingga setelah program berjalan 5 tahun, hanya ada satu kasus kehilangan ternak atau penyimpangan dari perjanjian, dan itupun sudah diselesaikan dengan tuntas. Penjualan dilakukan setelah sapi mencapai bobot badan minimal 250 kg, dan harga ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi (Rp/kg BH). Penjualan sapi hasil pembesaran dilakukan secara berkala. Sapi yang memenuhi syarat dikumpulkan dalam satu lokasi untuk memudahkan pelaksanaan penimbangan dan pengangkutan. Timbangan digital yang memenuhi syarat dipakai dalam proses penimbangan, dan selalu dilakukan peneraan sebelum penimbangan sapi dimulai. Pada saat proses penjualan, dilakukan penjelasan secara rinci untuk mengingatkan kembali isi perjanjian, informasi harga, serta kewajiban-kewajiban petani. Dalam kesempatan ini petani boleh bertanya, memberi masukan atau bahkan protes apabila terjadi ketidak sepakatan.

Calon pembeli harus menyerahkan uang muka ke koperasi sebelum ke lapang bersama petugas untuk melakukan penimbangan. Dalam setiap penimbangan, pembeli harus menyiapkan beberapa truck untuk mengangkut sapi yang memenuhi syarat untuk dibeli. Petani memperoleh haknya secara penuh sesaat setelah penimbangan, dibayar tunai, tanpa ada potongan apapun kecuali kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketepatan waktu pembayaran serta penyelesaian utang-piutang dilakukan pada saat itu juga, sehingga sampai sekarang tidak ada kredit macet. Setiap penjualan ternak, petani memperoleh pendapatan sekitar Rp. 1,1-1,3 juta/ekor, yang biasanya dipelihara selama 8-10 bulan. Jumlah ini nilainya sekitar 7-10 kali lipat dibanding program serupa yang dilakukan oleh investor sebelumnya. Dengan jumlah

sapi sebanyak 4-8 ekor, pendapatan petani dari program ini sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Permasalahan yang dihadapi dalam program ini adalah semakin sulitnya memperoleh sapi bakalan. Hal ini antara lain disebabkan karena masih tingginya angka pomotongan betina produktif. Kondisi ini berakibat pada terhambatnya pertumbuhan program pembesaran yang saat ini telah mencapai lebih dari 20 ribu ekor dengan peserta lebih dari 7100 KK. Secara kumulatif petani telah memperoleh pendapatan lebih dari Rp. 15 Milyar, dan program ini telah memberi kontribusi pajak daerah sebesar Rp. 0,5 Milyar. Sekarang, sedang menunggu sekitar 2 ribu KK calon peserta baru.

Dengan melihat kenyataan tersebut, sebagian petani telah memulai berinvestasi untuk membeli sapi betina untuk dikembangkan. Namun sebagian besar lagi mengharapkan bantuan dan bersedia untuk melakukan kegiatan kemitraan kombinasi antara pembesaran dan pembibitan (*cow calf operation*), walaupun disadari pendapatan yang akan diperoleh tidak sebesar program pembesaran. Pedet yang akan dihasilkan akan dibeli oleh koperasi dan kemudian dapat digaduhkan kembali untuk pembesaran. Untuk merespon harapan petani tersebut, koperasi mengalami kesulitan karena usaha *cow calf operation* memerlukan jangka waktu pengembalian modal sangat lama (> 5 tahun), sehingga dapat mengganggu perputaran modal. Untuk itu, diperlukan dukungan modal dari pemerintah melalui berbagai program yang pada intinya merupakan *soft loan* jangka panjang (LM3, kredit bersubsidi, bantuan internasional, dlsb). Namun diharapkan, semua 'bantuan' kepada petani tersebut harus tetap dilakukan dengan prinsip agribisnis, bukan 'hibah' atau '*charity*' karena dapat merusak semangat juang masyarakat.

Sapi hasil pembesaran dalam program ini masih layak untuk dipergunakan sebagai sapi bakalan pada program penggemukan selanjutnya, sehingga diperoleh bobot potong sekitar 300-350 kg. Kegiatan penggemukan ini sangat layak dilakukan oleh investor, karena merupakan kegiatan padat modal untuk keperluan pembelian konsentrat. Bila pemotongan dan/atau pengeluran sapi dari Kupang ditetapkan dengan bobot badan > 300 kg, dan ada jaminan tidak ada pemotongan betina produktif, dapat diharapkan populasi dan produksi daging akan meningkat secara signifikan. Sapi jantan yang terbaik juga dapat dimanfaatkan kembali untuk program pemuliaan melalui InKA atau IB.

Beberapa inovasi teknologi yang dapat diaplikasikan lebih lanjut untuk menambah keberhasilan program ini adalah: (a) penanaman hijauan pakan ternak dengan varietas yang lebih produktif, (b) vaksinasi dan dukungan pencegahan terhadap bahaya penyakit oleh Dinas Peternakan setempat, (c) pengolahan *faeces* dan *urine* menjadi kompos yang lebih berkualitas, atau pembuatan *biogas* untuk keperluan rumah tangga, serta (d) penjarangan dan pemanfaatan sapi hasil pembesaran sebagai pejantan agar terjadi peningkatan mutu genetik dan menghindari terjadinya *inbreeding*.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POLA KEMITRAAN PENGEMUKAN SAPI HASIL IB

Pola kemitraan penggemukan sapi hasil IB yang dilakukan Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspetasari Klaten dilakukan dalam rangka membantu korban bencana gempa yang menimpa masyarakat Klaten dan DI Yogyakarta. Pada prinsipnya program ini meniru keberhasilan program pembesaran sapi di NTT. Sapi bakalan yang dipergunakan adalah yang telah mencapai bobot badan 350 kg, digemukkan sampai mencapai bobot diatas 450 kg, dan diberi pakan konsentrat (komersial) yang telah disiapkan koperasi.

Tatacara pembentukan kelompok, penetapan lokasi dan peserta program, serta prinsip-prinsip kerjasama dilakukan sama seperti program pembesaran sapi di NTT. Semua sapi yang 'digaduhkan' diberi nomor atau tanda yang jelas, serta telah dilakukan komputerisasi dalam kegiatan pendataan, monitoring di lapang, dan perhitungan-perhitungan lainnya. Bila di NTT pembagian 'keuntungan' adalah 70:30, di Klaten porsi bagi hasil adalah 65 persen untuk peternak dan 35 persen untuk koperasi, karena modal yang dipergunakan jauh lebih tinggi (Rp. 1,5 juta vs Rp. 6-7 juta). Kewajiban peternak juga lebih komplek, yaitu menyiapkan kandang yang cukup representatif, menyediakan hijauan (jerami), dan merawat sapi dengan baik. Kewajiban koperasi adalah menyiapkan modal untuk pengadaan sapi dan memberi kredit pakan konsentrat, serta mencari pedagang yang bersedia membeli dengan harga tertinggi.

Dalam waktu 4 bulan pendapatan kotor peternak sekitar Rp. 1,66 juta/ekor, dimana 'keuntungan' petani sekitar Rp.1,07 juta dengan rata-rata pertambahan bobot harian sapi sebesar 0.83 kg. Namun jumlah ini sebetulnya merupakan akumulasi

biaya tenaga kerja, nilai jerami yang diberikan sapi, dan sewa kandang. Program ini sangat membantu petani yang terkena korban gempa atau yang saat ini tidak mempunyai alternatif pekerjaan lain di perdesaan. Beberapa daerah telah mempelajari untuk meniru sistem ini, karena secara nyata dapat membantu dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui kerjasama agribisnis yang transparan. Sementara itu saat ini terdapat beberapa program bantuan dari berbagai sumber untuk melakukan usaha penggemukan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi KJUB Puspetasari Klaten hampir sama dengan PUSKUD NTT, yaitu semakin sulitnya memperoleh sapi bakalan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu dukungan pemerintah untuk terus mengembangkan program pembibitan, IB dan kegiatan *cow calf operation* menjadi sangat diperlukan. Pemerintah juga diharapkan dapat lebih mengontrol larangan pemotongan sapi betina produktif, serta mencegah pemotongan sapi muda (kecil) yang dapat dimanfaatkan sebagai sapi bakalan. Seandainya sapi yang akan dipotong dapat digemukkan sampai mencapai bobot optimum sesuai potensi genetiknya, dengan tetap mempertimbangan aspek ekonomis, dapat diharapkan produksi daging sapi akan meningkat secara signifikan.

PENGEMBANGAN INDUSTRI PAKAN SKALA KECIL BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

Industri pakan berbahan baku limbah pertanian dan agroindustri yang dikembangkan CV Prima Feed Grati, Pasuruan telah berhasil mendorong perkembangan usaha penggemukan sapi skala kecil dan menengah, antara lain di Bali. Kegiatan bisnis penggemukan ini sepenuhnya dilakukan secara komersial dan telah memperoleh fasilitas perbankan. Pengembangan pakan murah berbasis bahan baku lokal ini didasarkan pada hasil penelitian dan kajian Loka Penelitian (Lolit) Sapi Potong, Grati dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur dalam hal analisa bahan baku, pengkayaan pakan, pengolahan bahan baku, penyusunan formula, pengembangan pabrik pakan, serta penggunaan alat dan mesin (*mini feed mill*) yang sangat efisien. Pabrik ini dapat terus berkembang karena mampu menjalin jejaring dengan wilayah yang memiliki bahan baku potensial. Pabrik bahan baku pakan dikembangkan di sentra-sentra sumber pakan, sehingga akan menjamin kualitas pakan, kemudahan dalam proses transportasi, serta adanya jaminan *stock* dan harga. Pola dalam pengembangan pabrik ini adalah menggunakan prinsip '*just in time*' sehingga sangat efisien dalam penyediaan gudang atau penyediaan *stock*, serta akan mengurangi beban perputaran modal dan sekaligus memperlancar *cash flow* perusahaan. Model pabrik pakan seperti ini sangat tepat untuk dikembangkan di setiap wilayah, dengan berpegang pada prinsip-prinsip teknis penyusunan pakan murah berkualitas, manajemen yang praktis dan ekonomis, serta menjalin jejaring kerja antara pemasok bahan baku, kegiatan pabrik, serta pola distribusi dan sistem pembayaran dengan para pengguna pakan.

Masalah yang muncul saat ini adalah, banyak bahan baku pakan yang justru diekspor ke manca negara untuk alasan perolehan devisa. Kondisi ini jelas akan mengganggu keberlanjutan usaha pabrik pakan dan bisnis peternakan pada umumnya. Oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk mengatur ekspor bahan baku pakan, seperti: pucuk tebu, silage jagung, onggok/gaplek, bungkil inti sawit, dlsb. Secara teoritis Indonesia mempunyai kelimpahan bahan baku pakan sumber serat, mempunyai potensi bahan pakan yang sangat besar yang berasal dari industri kelapa sawit, serta masih belum menggarap potensi pakan yang berasal dari limbah pertanian, perkebunan, perikanan dan agroindustri lainnya. Perkembangan industri bioetanol yang tidak direncanakan dengan seksama juga berpotensi menjadi pesaing industri pakan ternak.

Strategi pengembangan usaha penggemukan sapi potong harus didasarkan pada kondisi yang meliputi: (a) pakan sumber serat harus dapat disediakan secara *in situ* oleh peternak, (b) pakan tambahan ('konsentrat') disusun berdasarkan perhitungan *feed cost/gain*, atau biaya (Rp) untuk meningkatkan bobot badan (kg), serta (c) menghindari atau meminimalkan penggunaan bahan baku 'impor'. Dalam kasus pengembangan di Bali, usaha penggemukan sapi telah mendorong perkembangan usaha *cow calf operation*, karena harga bakalan meningkat cukup tajam. Secara tidak langsung hal ini akan berdampak pada pengurangan pemotongan betina produktif dan membuka lapangan kerja baru di perdesaan.

PENGEMBANGAN USAHA SAPI DENGAN PRINSIP RAMAH LINGKUNGAN

Pengembangan usaha sapi perah dengan pendekatan *'zero waste'* dan *'zero cost'* telah ditunjukkan dengan sangat baik oleh PT Lembah Hijau Multifarm (LHM), Solo. Manajemen pemeliharaan sapi yang telah dikembangkan lebih dari satu dasawarsa ini difokuskan untuk menghasilkan kompos (padat maupun cair), dengan bonus berupa susu yang berkualitas dan pedet yang sehat. Pola ini telah dapat membuktikan bahwa industri kompos merupakan alternatif paling baik dalam usaha *cow calf operation*, karena nilai kompos yang dihasilkan mampu menutup sebagian (besar) biaya pemeliharaan (pakan) ternak. Bisnis di PT LHM merupakan pengembangan ternak pola integrasi tanaman ternak (*crop livestock system, CLS*) secara *ex-situ* yang mengandalkan prinsip LEISA (*low external input sustainable agribusiness*).

Ternak yang dipelihara secara terkurung sangat memudahkan dalam mengumpulkan kotoran yang akan diolah menjadi kompos berkualitas. Pola pemeliharaan ini mirip dengan penggemukan ternak sistem kereman (dalam program PUTP pada tahun 1970-an) yang sudah berkembang lama di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Inovasi pengolahan kompos, pemanfaatan jerami padi fermentasi, serta pemberian pakan inkonvensional merupakan kekuatan tersendiri yang sangat mudah dikembangkan dengan pola yang sama oleh masyarakat.

PT LHM telah menunjukkan bahwa pemberian jerami padi yang difermentasi untuk menggantikan 100 persen rumput untuk sapi perah harus menjadi pertimbangan dalam mengembangkan sapi di daerah persawahan. Saat ini di DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa daerah lain, pemanfaatan

jerami padi untuk pakan ternak sudah umum dilakukan, walaupun sebagian besar tidak dilakukan usaha pengkayaan (*feed enrichment*). Ironisnya, di wilayah pantura Jawa Barat dan daerah lumbung beras lain masih menganggap bahwa jerami tidak layak untuk diberikan kepada ternak, sehingga di kawasan tersebut 'kosong' ternak. Peternak sapi perah di Lembang, misalnya, mengalami kesulitan rumput pada musim kemarau, padahal jerami tersedia melimpah di wilayah pantura.

Belajar dari PT LHM, pengembangan ternak pola integrasi (sistem integrasi padi ternak, SIPT), khususnya untuk sapi potong dan kerbau, sebaiknya dilakukan secara *in-situ*. Pola ini akan menghemat atau mengefisienkan perputaran pakan-kompos, sehingga pengembangan ternak secara langsung juga akan berdampak pada peningkatan produksi tanaman.

Perusahaan ini juga menunjukkan bahwa pemasaran susu segar kepada masyarakat akan memberi keuntungan yang lebih besar, dan pada saat yang sama masyarakat dapat memperoleh pangan bergizi dengan harga yang sangat terjangkau. Pola pemasaran susu seperti ini jelas akan menguntungkan peternak, sehingga ketergantungan pada IPS yang belum dapat memberi harga atraktif dapat diminimalkan. PT LHM yang terletak di dataran rendah telah mampu mengembangkan sapi FH dengan hasil susu yang cukup *feasible* secara ekonomis. Pengalaman ini dapat memberi inspirasi bahwa di Pulau Jawa yang sudah sangat padat ini dapat diarahkan untuk pengembangan sapi perah tipe '*low input*', dengan bonus pedet jantan yang layak untuk dijadikan sebagai sapi bakalan. Strategi dan inovasi dalam segala aspek harus dijadikan landasan dalam proses pengembangan selanjutnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari pemaparan keempat pembicara serta komentar dan saran para pembahas maupun peserta pertemuan dapat ditarik benang merah bahwa: (a) Keberhasilan suatu program atau usaha harus didasarkan pada kekuatan dan potensi sumberdaya lokal, antara lain pakan dan bibit, (b) Kegiatan yang dilakukan harus dijalankan dengan sangat profesional dengan memperhatikan prinsip-prinsip agribisnis secara konsisten, (c) Kesederhanaan program, dan penegakan *good governance*: transparansi, ketekunan, kesungguhan, pemberdayaan, pendampingan, *law enforcement*, serta *reward and punishment* merupakan prasyarat mutlak yang harus dijalankan secara konsisten, (d) Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikembangkan di wilayah lain, dengan dilakukan penyesuaian terhadap agroekologi dan kondisi sosial budaya masyarakat, serta (e) Keberlanjutan usaha hanya akan terjadi bila memberi manfaat nyata dan keuntungan finansial bagi para pelakunya, dan dapat dilakukan melalui mekanisme skim pembiayaan pertanian yang berlaku saat ini. Hal ini juga dapat mempertimbangkan skala usaha yang ekonomis dan menuju komersial.

Peraturan perundangan yang masih berlaku tentang larangan pematangan betina produktif dan pengurusan ternak bibit harus benar-benar dijalankan untuk menjamin pasokan bakalan dan peningkatan populasi. Sosialisasi, pengawasan, insentif, dan *law enforcement* untuk hal ini harus benar-benar dilakukan secara berkelanjutan, serta dibarengi dengan upaya-upaya lain untuk menjamin pelaksanaan peraturan ini (seperti: pajak yang tinggi atas pematangan betina produktif, penyediaan dana talangan, penghargaan kepada petugas dan masyarakat, dll.). Pematangan ternak muda atau yang masih dapat

meningkat bobot badannya sesuai kemampuan genetiknya harus dicegah dengan berbagai cara, antara lain dengan sistem 'pajak progressif'. Retribusi atau pajak yang dikenakan pada ternak yang masih kecil harus ditingkatkan, sehingga para jagal akan berfikir ulang untuk memotong ternak berukuran kecil. Di setiap daerah penetapan ini dapat bervariasi, serta setiap jenis (*breed*) ternak juga mempunyai batas minimal yang berbeda. Peraturan daerah yang sudah ada tentang pengeluaran dan pemotongan ternak, serta masih relevan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten.

Ekspor bahan baku pakan ternak harus diatur kembali, dan bahan-bahan tersebut harus diutamakan untuk kepentingan pengembangan industri peternakan di dalam negeri. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian makro dengan instansi terkait tentang kebijakan ekspor-impor bahan pakan, dengan sasaran agar industri peternakan dapat berkembang dan lebih tangguh.

Aplikasi inovasi teknologi harus dilakukan secara selektif, terutama dalam proses pengembangan atau memperbanyak program yang telah berhasil di suatu wilayah. Mitos bahwa masyarakat daerah tidak dapat diikuti sertakan dalam suatu program tidak sepenuhnya tepat (kasus NTT), namun yang diperlukan adalah pendekatan dan rekayasa sosial yang lebih tepat. Dukungan pemerintah dalam hal pendanaan untuk usaha peternakan sangat diperlukan, namun pelaksanaannya harus dilakukan oleh atau bersama masyarakat. Pemerintah harus mengawasi, membina, serta memberi dukungan dalam hal perbibitan, keswan, pengembangan infrastruktur dan transportasi.

Kegiatan usaha penggemukan sapi potong sepenuhnya sudah dapat dilakukan masyarakat dengan dukungan kredit, sementara kegiatan perbibitan harus ada campur tangan pemerintah. Usaha *cow calf operation* dilakukan bersama antara

pemerintah, masyarakat dan pengusaha dengan dukungan *soft loan* jangka panjang.

**MATRIKS RENCANA TINDAK PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI MODEL PENGEMBANGAN
USAHA SAPI POTONG**

Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pengemban Kepentingan
I. SASARAN			
1. Upaya mendorong pencapaian swasembada daging sapi tahun 2010 melalui program pemberdayaan masyarakat	Produksi daging meningkat, sehingga volume impor daging dan sapi bakalan hanya sebesar 9,8 persen	2010	DitjenNak Pemprov, Pemkab
2. Upaya peningkatan produksi sapi di dalam negeri dengan memanfaatkan potensi genetik sapi lokal	Alternatif model-model pengembangan usaha sapi potong berbasis sumberdaya lokal	2008-2010	Pemprov, DitjenNak, PuslitbangNak

3. Upaya pembentukan kelompok peternak dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha sapi potong	Terciptanya kelompok-kelompok peternak usaha sapi potong yang tangguh	2008-2009	Pemprov, Dinas terkait, DitjenNak, Koperasi
--	---	-----------	---

II. MODEL PENGEMBANGAN USAHA SAPI POTONG

1. Program pengembangan pembibitan sapi dengan memanfaatkan potensi ternak unggul	Terpenuhinya kebutuhan pejantan unggul sapi lokal atau sapi <i>exotic</i> untuk mendukung program InKA dan IB	2008-2010	DitjenNak (BPTU dan B/BIB), UPT-D, Kelompok VBC, Swasta
2. Program pengembangan usaha <i>cow calf operation</i> sapi potong	Tersedianya pasokan sapi betina berkualitas sebagai <i>replacement</i> atau disebarkan ke masyarakat	2008-2010	Pemkab, Pemda, DitjenNak, Masyarakat

3. Program pengembangan usaha pembesaran sapi potong	Tersedianya sapi-sapi dengan bobot badan yang layak untuk digemukkan secara berkelanjutan	2008-2010	Pemprov dan Pemkab, Swasta/BUMN
4. Program pengembangan usaha penggemukan sapi lokal maupun silangan hasil IB	Tersedianya sapi-sapi siap potong dengan bobot potong optimal sesuai potensi genetik melalui inovasi teknologi pakan murah	2008-2010	Swasta/BUMN, BUMD, Koperasi Masyarakat
III. DUKUNGAN TEKNOLOGI			
1. Inovasi teknologi penjarangan dan pemanfaatan sapi hasil pembesaran sebagai calon pejantan untuk	Peningkatan mutu genetik melalui <i>outcrossing</i> dan menghindari terjadinya <i>inbreeding</i>	2008-2009	PuslitbangNak, BPTP, Perguruan Tinggi

mendukung program InKA dan IB			
2. Inovasi teknologi pakan murah berbasis sumberdaya lokal dan limbah pertanian, perkebunan dan agro industri	Tersedianya sumber bahan baku pakan secara berkelanjutan untuk menyusun pakan komplit yang murah dan berkualitas	2008-2009	PuslitbangNak, BPTP Perg Tinggi PUSKUD, Swasta/BUMN
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber hijauan lokal dengan varietas yang lebih produktif seperti tahan penyakit dan kekeringan.	Tersedianya benih unggul dan sumber pakan hijauan dengan biaya yang minimal	2008-2009	PuslitbangNak, UPT litbang lain, Perguruan Tinggi Koperasi, Swasta/BUMN
4. Inovasi sistem integrasi tanaman-ternak melalui pendekatan <i>zero cost</i> dan <i>zero waste</i>	Pengolahan <i>faeces</i> dan <i>urine</i> menjadi kompos berkualitas, serta pembuatan	2008-2010	PuslitbangNak, BPTP, UPT litbang lain, Perg Tinggi Koperasi, Swasta/BUMN, Dinas terkait

	biogas untuk kebutuhan rumahtangga		
IV. KELEMBAGAAN			
1. Program agribisnis pola kemitraan yang sederhana dan mudah dipahami dengan prinsip adil, jujur, transparan dan konsisten	Kesepakatan kerjasama yang transparan dengan pembagian keuntungan 70 persen bagi peternak dan 30 persen untuk inti	2008-2010	Pemda, Dinas terkait, Koperasi, Masyarakat
2. Pembentukan kelompok peternak dan gabungan kelompok peternak berdasarkan prinsip-prinsip berkooperasi yang baik, serta dilakukan dengan cara sukarela	Meningkatnya peran kelompok peternak dalam posisi tawar, akses informasi dan efektivitas komunikasi	2008-2010	Pemda, BPTP, Dinas terkait, Badan SDM Pertanian, Koperasi Masyarakat

<p>3. Pembentukan tenaga pendamping dan pengawalan swakarsa dengan semangat dan etos kerja tinggi, serta memperhatikan sosial budaya masyarakat dan aspek kearifan lokal</p>	<p>Peningkatan pendampingan, pengawasan dan akurasi program oleh tenaga yang terampil dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab</p>	<p>2008-2010</p>	<p>Badan SDM Pertanian, BPTP, Koperasi, Masyarakat</p>
<p>4. Revitalisasi tenaga penyuluh dan sarjana pertanian dalam membangun desa</p>	<p>Tersedianya tenaga-tenaga lapang yang terampil dan berdedikasi</p>	<p>2008-2010</p>	<p>Badan SDM Pertanian, Perguruan Tinggi</p>
<p>V. DUKUNGAN KEBIJAKAN</p>			
<p>1. Pengaturan dan penetapan tarif ekspor bahan baku pakan ternak untuk</p>	<p>PP, KepMen, dan/atau Perda tentang ekspor impor dan tataniaga bahan pakan</p>	<p>2008-2010</p>	<p>Deptan, Deperindag, Pemprov, Pemkab</p>

<p>pengembangan industri pakan dalam negeri</p>	<p>yang diutamakan untuk keperluan industri pakan dan usaha peternakan di dalam negeri</p>		
<p>2. Penegakan aturan tentang larangan pemotongan ternak betina produktif, serta aturan pemotongan ternak muda, antara lain dengan sistem 'insentif dan disinsentif'</p>	<p>Peraturan daerah tentang pelaksanaan larangan betina produktif dan sistem pajak progresif dalam pemotongan ternak muda (kecil) dan produktif</p>	<p>2008-2010</p>	<p>Deptan, Pemprov, Pemkab dan Dinas terkait</p>
<p>3. Dukungan kebijakan investasi usaha pengembangan sapi potong melalui <i>softloan</i> jangka panjang melalui subsidi</p>	<p>Swasta/BUMN atau koperasi agar dapat tertarik untuk mengembangkan usaha <i>cow calf operation</i></p>	<p>2008-2010</p>	<p>Swasta/BUMN, Deptan, Perbankan, Koperasi, Pemprov, Pemkab</p>

bunga kredit komersial (6 persen)	yang terintegrasi dengan usaha pembesaran dan penggemukan		
5. Kemudahan akses petani pada lembaga keuangan mikro melalui berbagai skim pembiayaan pertanian	Meningkatnya pendanaan untuk usaha sapi potong (<i>cow calf operation</i> , pembesaran dan penggemukan)	2008-2010	Deptan, Perbankan, Swasta/BUMN, Pemprov, Pemkab

DAFTAR BACAAN

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2005. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Sapi. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Boediyana, T. 2007. Kesiapan dan Peran Asosiasi Industri Ternak Menuju Swasembada Daging Sapi 2010. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia XVII, Bogor, 21 Nopember 2007.
- Kasryno, F. 2004. Strategi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Indonesia yang Memihak Masyarakat Miskin. ADB TA 3843-INO. Agriculture and Rural Development Strategy Study (ADB, CASER-AARD-MoA, SEAMEO-SEARCA, CRESENT).
- Puslitbang Peternakan. 2006. Rencana Tindak program Menuju Kecukupan Daging Sapi 2010. Penyunting: Inounu, I., E. Martindah dan A. Priyanti. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Soedjana, T.D. 2007. Masalah dan Kebijakan Peningkatan Produk Peternakan untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia XVII, Bogor, 21 Nopember 2007.
- Statistik Peternakan. 2006. Direktorat Jendral Peternakan, Departemen Pertanian, Jakarta.

TIM PERUMUS

1. Prof. Dr. Kusuma Diwyanto, Puslitbang Peternakan, Bogor
2. Prof. Dr. Subandriyo, Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor
3. Prof. Dr. Sjamsul Bahri, Direktur Perbibitan, Ditjen Peternakan
4. Ir. Fauzi Luthan, Direktur Budidaya Ternak Ruminansia, Ditjen Peternakan
5. Dr. Ismeth Inounu, Puslitbang Peternakan, Bogor
6. Dr. Argono R. Setioko, Balai Penelitian Ternak, Ciawi-Bogor
7. Dr. Atien Priyanti, Puslitbang Peternakan, Bogor
8. Benny Subagiyo, SE, Pusat KUD Kupang, Nusa Tenggara Timur
9. Khairul Anam, PT. Prima Feed Grati, Pasuruan
10. Bambang Wibisono, Koperasi Jasa Usaha Bersama Puspetasari, Klaten
11. Andreas, CV. Lembah Hijau Multifarm, Solo
12. Ir. Teguh Boediyono, MS., Sekjen PPSKI
13. Drh. Herliantien, BBIB, Singosari Malang
14. Dr. Lies Parede, Balai Besar Penelitian Veteriner, Bogor
15. Dr. Eny Martindah, Puslitbang Peternakan, Bogor
16. Ratna Ayu Saptati, SPT, MSi, Puslitbang Peternakan, Bogor

LAMPIRAN

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI *CONTRACT FARMING* SAPI BALI: *SUCCESS STORY*,
KENDALA DAN HARAPAN**

Beny Subagiyo

Pusat KUD Nusa Tenggara Timur

RINGKASAN

Mayoritas masyarakat NTT tergolong sangat miskin dengan angka pengangguran yang cukup besar. Mata pencaharian pokok adalah bertani dan memelihara ternak terutama sapi potong. Tetapi seperti petani pada umumnya, keterbatasan modal menjadi kendala bagi untuk mengembangkan usahanya. Sebagian besar peternak hanya bertindak sebagai penggaduh, dan kontrak kerja bisnis sapi dengan pemodal yang ada kurang menggairahkan. Rata-rata petani hanya mendapatkan bagian Rp. 300 ribu per ekor untuk masa pemeliharaan dua tahun. Selain itu berat badan sapi yang dihasilkan dan diantarpulaukan masih terlalu kecil, yakni dibawah 250 kg.

Kondisi tersebut telah mendorong Pusat KUD (PUSKUD) NTT untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan *income* bagi petani miskin. Program yang dimulai sejak tahun 2002 ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan kelompok serta meningkatkan mutu sapi yang diantarpulaukan. Program kemitraan antara PUSKUD NTT dengan (kelompok) petani ini berupa program pembesaran sapi Bali pola 'gaduhan' dengan memanfaatkan sumberdaya (pakan) lokal terutama

lamtoro dan hijauan lainnya yang tersedia di perdesaan. Pola gaduhan ini menganut sistem bagi hasil keuntungan dengan porsi 70 persen untuk petani dan 30 untuk koperasi. Petani menyediakan tenaga, pakan dan kandang, sedangkan bibit sapi, obat-obatan, sarana pendukung serta bimbingan teknis di lapangan disediakan oleh PUSKUD NTT. Dalam program ini pendekatan prinsip agribisnis dilakukan secara jujur, adil, transparan, dan konsisten.

Pada tahap awal program dilakukan survei lapang melalui pendekatan PRA dan sosialisasi program kepada pengurus desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengetahui respon masyarakat terhadap program tersebut serta penjelasan perjanjian menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dukungan tokoh masyarakat dan perangkat desa merupakan langkah awal dalam menetapkan lokasi kegiatan. Selain itu juga dilakukan pengecekan kondisi lokasi dan ketersediaan pakan ternak oleh pengurus kelompok dan pamong desa karena hal ini merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan program. Setiap petani harus memiliki lahan HMT untuk mencukupi pakan sapi lebih dari satu ekor selama 8-12 bulan. Jumlah sapi yang diberikan disesuaikan dengan ketersediaan pakan dan tenaga kerja. Kerjasama ini dituangkan dalam suatu surat perjanjian yang dirinci secara jelas dan tegas termasuk semua hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta resiko atau sangsi bila terjadi pelanggaran. Penandatanganan kontrak diketahui oleh kepala desa dan pemuka agama.

Penanggung jawab sekaligus pelaksana program ini terdiri dari petani, pengurus kelompok, PPL, petugas lapangan dari PUSKUD. Peserta program ini harus membentuk suatu kelompok peternak yang beranggotakan 25 – 30 orang per kelompok, dan 3 (tiga) orang diantaranya dipilih secara demokratis sebagai pengurus kelompok. Pengurus kelompok berkewajiban

mengajukan kebutuhan sapi, pengobatan, kontrol anggota, melaporkan kondisi sapi ke staf lapangan dan menginventarisir sapi siap timbang.

Sapi bakalan yang diberikan ke petani harus memenuhi kriteria, yaitu jantan, sehat dan tidak cacat, umur 2 tahun, tinggi 105 – 107 cm dengan berat 150 –170 kg. Apabila tidak sesuai kriteria, dapat diberikan bila sapi dalam kondisi bagus dan keputusan berada di pihak petani. Pengadaan sapi bakalan dilaksanakan oleh pengusaha kecil dan penyerahannya di lokasi kelompok setelah diseleksi yang dilakukan oleh ketua kelompok bersama anggotanya dan PUSKUD NTT. Pembagian dilakukan dengan sistem undian.

Setiap 2-3 bulan dilakukan monitoring dan kontrol kesehatan. Target pertumbuhan ADG 0,3 – 0,5 kg. Petani dilarang mengganti atau menjual sapi, kecuali ada petunjuk dan disaksikan oleh petugas lapang maupun PUSKUD NTT. Penjualan dilakukan setelah sapi mencapai bobot badan minimal 250 kg, dan harga ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi (Rp/kg BH). Penjualan sapi hasil pembesaran dilakukan secara berkala. Sapi yang memenuhi syarat dikumpulkan dalam satu lokasi untuk memudahkan pelaksanaan penimbangan dan pengangkutan. Penjualan dilakukan dengan sistem lelang yang menghadirkan pembeli yang bersedia membayar dengan harga tertinggi. Perhitungan bagian yang diterima petani dilakukan pada saat itu juga secara tunai tanpa potongan kecuali kewajiban-kewajiban (tabungan wajib, iuran desa, obat, tali, anting, dsb).

Sampai saat ini jumlah petani yang terlibat dalam program ini berjumlah lebih 7100 orang, dengan jumlah sapi lebih dari 20 ribu ekor. Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memberikan pendapatan daerah. Secara kumulatif petani telah memperoleh pendapatan lebih dari

Rp. 15 Milyar, dan program ini telah memberi kontribusi pajak daerah sebesar Rp. 0,5 Milyar. Sekarang, sedang menunggu sekitar 2 ribu KK calon peserta baru. Keberhasilan program ini karena program sangat sederhana dan mudah dipahami, menggunakan prinsip agribisnis dan menguntungkan, dilaksanakan secara transparan dan jujur, efisien dalam pelaksanaan, *law enforcement* secara konsisten, serta adanya komitmen pengurus dan pelaksana.

Permasalahan yang dihadapi dalam program ini adalah semakin sulitnya memperoleh sapi bakalan, terbatasnya pemilikan hijauan pakan ternak, infrastruktur (jalan) yang sulit, dan pungutan dari tingkat desa sampai kabupaten yang cenderung meningkat. Oleh karena itu sangat diperlukan dukungan program perbibitan atau *cow calf operation* untuk menghasilkan bakalan, integrasi program pembibitan pada kelompok binaan PUSKUD NTT, peningkatan penanaman pakan dan pengembangan *feed bank*, dukungan keswan dan pembangunan prasarana, pembangunan sumur, cekdam atau embung untuk menjamin ketersediaan air serta adanya jaminan keamanan. Pada tahun 2008 yang akan datang akan dimulai program *cow calf operation* dengan membagi 300 sapi dara (*heifer*) atau sapi bunting. Pembagian keuntungan yang diusulkan adalah 80 persen untuk petani dan 20 persen untuk koperasi, sehingga petani lebih bergairah dalam usahanya.

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MODEL
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SAPI HASIL IB:
*SUCCESS STORY, KENDALA DAN HARAPAN***

Bambang Wibisono

Koperasi Jasa Usaha Bersama PUSPETASARI Klaten

RINGKASAN

Peternakan rakyat, khususnya budidaya sapi potong baik secara tradisional maupun intensif sudah teruji ketahanannya oleh berbagai guncangan perekonomian. Jika sebelumnya peternak di daerah Klaten dan DIY menggunakan sapi lokal, saat ini telah banyak petani yang memelihara sapi potong hasil IB yaitu hasil persilangan antara sapi-sapi bibit unggul (Simmental, Limousin) dengan induk lokal. Penggunaan sapi bakalan hasil IB ini dirasakan oleh petani semakin menunjang keberhasilan budidaya sapi potong. Tetapi terjadinya bencana alam gempa bumi pada bulan Mei 2006 dan meletusnya gunung Merapi yang melanda Klaten dan DIY serta daerah di sekitarnya telah mengakibatkan terhambatnya laju pengembangan budidaya sapi potong tersebut, sehingga perlu perhatian yang serius dari pihak yang terkait.

Dalam rangka membantu korban bencana gempa yang menimpa masyarakat Klaten dan DIY, KJUB Puspetasari Klaten mengadakan program kemitraan penggemukan sapi hasil IB, dengan bagi hasil 65:35. Program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan kemandirian peternak serta membuka peluang bisnis melalui pengembangan budidaya sapi

potong sehingga dapat menjadi basis perekonomian bagi masyarakat peternakan di perdesaan. Peternak sebagai penggaduh harus mempunyai pengalaman beternak, mempunyai lahan dan sumber hijauan serta mampu memelihara ternak dengan baik serta berkewajiban menyediakan perkandangan. Sedangkan KJUB Puspetasari berkewajiban menyediakan sapi bakalan, tenaga supervisi, membina dan membimbing peternak, penanganan kesehatan hewan serta menjual hasil pemeliharaan. Dalam kegiatan ini sapi bakalan yang dipergunakan adalah sapi hasil silangan dengan Simental atau Limousin dengan bobot badan maksimal 450 kg, sehat dan tidak cacat, sapi diberi pakan konsentrat (komersial) yang telah disiapkan koperasi, dan dipelihara selama 4-5 bulan.

Tahapan sistem gaduhan ini meliputi sosialisasi, verifikasi, *dropping* ternak, pengawasan budidaya dan penjualan sapi. Pada tahap sosialisasi diinformasikan tentang pemeliharaan sapi sistem gaduhan tersebut meliputi perkandangan, pakan dan pemeliharaan. Peternak diwajibkan membentuk kelompok ternak yang kemudian menjadi anggota koperasi dan mendaftar sebagai calon penggaduh. Pada tahap verifikasi dilakukan cek kandang, kemampuan pemeliharaan dan kesiapan hijauan. Jika peternak memenuhi syarat maka akan diusulkan untuk *dropping*/pengiriman ternak. Pengadaan sapi dilakukan peternak/ketua kelompok bersama-sama dengan petugas Puspetasari untuk memilih dan sepakat terhadap sapi yang disediakan oleh supplier. Sapi yang terpilih ditimbang dan dikirim ke lokasi peternak. Di lokasi peternak sapi-sapi diundi untuk diterimakan ke peternak.

Pengawasan budidaya dilakukan oleh KJUB Puspetasari dengan menyediakan tenaga supervisi yang bertugas mengawasi ternak, membina dan mengarahkan sistem pemeliharaan, kontrol kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan serta kontrol bobot

badan. Puspeta juga menyediakan pakan penguat (konsentrat Nutrifeed) yang dibayar pada saat setelah sapi panen. Pada saat penjualan sapi, pembeli dapat dicarikan oleh KJUB Puspetasari atau petani dapat mencari pembeli sendiri dengan persetujuan dari petugas Puspetasari. Harga jual sapi dipilih yang paling tinggi. Apabila masa pemeliharaan sudah mencapai 4-5 bulan tetapi sapi belum siap potong, maka sapi dipindahkan ke peternak lain. Tetapi peternak lama tetap mendapatkan kompensasi dari nilai laba ketika dipindahkan.

Realisasi program sampai dengan Oktober 2007, jumlah sapi yang digaduhkan telah mencapai 1588 ekor, dengan jumlah sapi yang telah dijual 872 ekor. Rata-rata keuntungan per ekor Rp. 1.658.000,- dimana bagian peternak per ekor adalah Rp. 1.077.700 dengan rata-rata masa pemeliharaan 137 hari dan rata-rata ADG 0,83 kg.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi program ini adalah: (a) terbatasnya bibit-bibit sapi bakalan unggul hasil IB dengan Simental dan Limousin, (b) budidaya sapi potong masih dianggap sebagai usaha sambilan belum ditekuni menjadi usaha pokok dengan skala yang lebih besar, (c) petani kurang berinovasi dalam hal kemajuan teknologi budidaya sapi potong, dan (d) belum mengelola usaha secara profesional.

Dari program ini diharapkan budidaya sapi potong (hasil IB) dapat dijadikan basis usaha peternakan rakyat, karena terbukti peternakan rakyat lebih tangguh dalam menghadapi berbagai guncangan krisis perekonomian. Petani peternak juga harus lebih didorong dalam hal penguatan modal, utamanya untuk investasi perkandangan maupun modal kerja pembiayaan pakan.

PEMANFAATAN LIMBAH PERTANIAN AGROINDUSTRI DALAM AGRIBISNIS SAPI BALI

Didiek E. Wahyono dan K. Anam
CV. Prima Feed, Grati-Pasuruan

RINGKASAN

Perkembangan kebutuhan pakan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri peternakan. CV Prima Feed Grati, Pasuruan telah berhasil mengembangkan industri pakan berbahan baku limbah pertanian dan agroindustri yang selama ini terbuang dan berpotensi mencemari lingkungan; Industri pakan ini telah berhasil mendorong perkembangan usaha penggemukan sapi skala kecil dan menengah, antara lain di Bali. Pengembangan ransum murah berbasis bahan baku lokal ini didasarkan pada hasil penelitian dan kajian Loka Penelitian (Lolit) Sapi Potong, Grati dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur dalam hal analisa bahan baku, pengkayaan pakan, pengolahan bahan baku, penyusunan formula, pengembangan pabrik pakan, serta penggunaan alat dan mesin (*mini feed mill*) yang sangat efisien.

Pabrik ini dikembangkan berdasarkan prinsip '*just in time*' sehingga sangat efisien dalam penyediaan gudang atau penyediaan stock, serta akan mengurangi beban perputaran modal, sekaligus memperlancar *cash flow* perusahaan. Pasokan dan gudang bahan baku pakan dikembangkan di sentra-sentra sumber pakan, sehingga akan menjamin kualitas pakan, kemudahan dalam proses transportasi, serta adanya jaminan stock dan harga. Model pabrik pakan seperti ini sangat tepat

untuk dikembangkan di setiap wilayah, dengan berpegang pada prinsip-prinsip teknis penyusunan pakan murah berkualitas, manajemen yang praktis dan ekonomis, serta menjalin jejaring kerja antara pemasok bahan baku, kegiatan pabrik, serta pola distribusi dan sistem pembayaran dengan para pengguna pakan.

Strategi pengembangan usaha penggemukan sapi terpadu dapat dilakukan melalui integrasi industri pengolahan bahan pakan dan usaha ternak dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya ternak dan bahan baku lokal setempat, antara lain dengan memperhatikan: (a) pakan sumber serat harus dapat disediakan oleh peternak sendiri, (b) pakan tambahan ('konsentrat') disusun berdasarkan perhitungan *cost feed/gain*, atau dengan memperhitungkan biaya (Rp) untuk meningkatkan bobot badan (kg), serta (c) menghindari atau meminimalkan penggunaan bahan-bahan 'impor'. Inovasi yang dipilih harus mampu meningkatkan daya saing produk, berkelanjutan, serta mampu merespon 'dinamika pasar' dan ketersediaan bahan-bahan untuk setiap musim.

PENGEMBANGAN PETERNAKAN SAPI PERAH DENGAN PENDEKATAN *ZERO WASTE* DAN *ZERO COST*

Suharto

P.T. Lembah Hijau Multifarm, Surakarta

RINGKASAN

Peternak sapi perah di Indonesia rata-rata memiliki sapi sangat sedikit sehingga memerlukan pembinaan dalam pengembangan budidaya dengan teknologi pakan, dan manajemen ternak yang baik dan benar. PT Lembah Hijau Multifarm (LHM) telah mengembangkan bisnis sapi perah dengan pendekatan '*zero waste*' dan '*zero cost*'. Manajemen pemeliharaan sapi difokuskan untuk menghasilkan kompos (padat maupun cair), dengan bonus berupa susu yang berkualitas dan pedet yang sehat. Pola budidaya sapi perah yang diterapkan LHM dilakukan secara integrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan budidaya perikanan sehingga masing-masing komponen secara terpadu dapat menciptakan efisiensi dan meningkatkan keuntungan tanpa menghasilkan limbah (*zero waste*). Pemberian jerami padi yang difermentasi untuk menggantikan 100% rumput untuk sapi perah telah dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan sapi di daerah persawahan.

Melalui pola ini telah terbukti bahwa industri kompos merupakan alternatif paling baik dalam usaha breeding atau *cow calf operation*, karena nilai kompos yang dihasilkan mampu menutup sebagian (besar) biaya pemeliharaan (pakan) ternak. Bisnis di PT LHM merupakan pengembangan ternak pola

integrasi tanaman ternak (*crop livestock system*, CLS) secara *ex-situ* dengan mengandalkan prinsip LEISA (*Low External Input Sustainable Agribusiness*), yaitu suatu konsep yang menggabungkan prinsip agro-ekologi serta pengetahuan dan praktek pertanian masyarakat setempat. Konsep LEISA secara singkat diuraikan sebagai berikut: (i) mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya (pakan) lokal, (ii) mengoptimalkan daur ulang (*zero waste*), (iii) meminimalkan kerusakan lingkungan, (iv) mendiversikan usaha, (v) sasaran produksi stabil, memadai dalam jangka panjang, serta (vi) menciptakan kemandirian.

ISBN : 978-979-8308-79-6

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16151
Telp. (0251) 322185, 322138
Fax. (0251) 328382, 380588
E-mail: criansci@indo.net.id**